

BAB I:

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJP II) peran pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (PSDM) amat penting dan strategis. Meskipun PSDM bukan hanya dilakukan melalui pendidikan—khususnya pendidikan sekolah—sampai saat ini dipercayai bahwa pendidikan merupakan wahana utama untuk PSDM yang dilakukan secara sistematis, programatis, dan berjenjang. Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan dengan memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian, pendidikan merupakan wahana dan sekaligus cara untuk membangun manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Melalui pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas yang dideskripsikan secara jelas dalam GBHN (1993, 1998) dan UUSPN. Menyiapkan dan membina manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana dikehendaki GBHN dan UUSPN merupakan kebutuhan amat mendesak lebih-lebih jika dikaitkan dengan era globalisasi yang penuh dengan berbagai tantangan dan peluang. Dalam memasuki era globalisasi manusia Indonesia diharapkan mampu melakukan interaksi, kompetisi, dan sekaligus kooperasi secara global.

Menyadari pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan SDM, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan, relevansi, kualitas, dan efisiensi pendidikan. Beberapa kebijakan yang telah diluncurkan antara lain: pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberlakuan Kurikulum 1994, Kebijakan *link and*

match, Sistem Pengadaan-Pemanfaatan dan pembinaan guru, Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul, dan Manajemen Nasional Sektor Pendidikan.

Di antara jenjang pendidikan, pendidikan dasar merupakan jenjang yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Pada jenjang pendidikan inilah kemampuan dan keterampilan dasar dikembangkan pada peserta didik, baik sebagai bekal untuk pendidikan lanjutan maupun untuk terjun ke masyarakat. Sekaitan dengan itu, pada tanggal 2 Mei 1994 Presiden Soeharto telah mencanangkan dimulainya pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) untuk usia 7 sampai dengan 15 tahun. Wajib belajar pendidikan dasar mengandung arti bahwa pemerintah membuka peluang se-luas-luasnya bagi semua peserta didik yang telah memenuhi persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar (Depdikbud, 1994).

Salah satu dasar pertimbangan perluasan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun dari wajar dikdas 6 tahun, adalah karena keberhasilan pelaksanaan wajar dikdas 6 tahun terutama dari aspek pemerataan kesempatan. Secara kuantitas penyelenggaraan pendidikan di SD telah berhasil mencapai sasarannya, yaitu: 93,5% anak usia 7-12 tahun telah tertampung. Namun demikian di sisi lain terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, yaitu: masih rendahnya kualitas pendidikan, dan tingginya angka putus sekolah serta angka mengulang kelas di SD.

Pekerjaan rumah bagi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan dalam menuntaskan pendidikan di SD adalah:

1. Angka putus sekolah (Drop Out) di SD cukup tinggi, yaitu sekitar 1,2 juta siswa setiap tahun. Tingkat putus sekolah di SD bervariasi pada setiap tingkatan kelas, yaitu: Kelas I sebanyak 2,8%, Kelas II 3%, di kelas III 4,6%, di kelas IV 5,1%, di kelas V 5,3%, dan di kelas VI 3,3%.
2. Angka mengulang kelas di SD masih cukup tinggi, yaitu: Kelas I SD 16,7%, di kelas II 12,4%, di kelas III 10,6%, di kelas IV 8,5%, di kelas V 6,7%, dan di kelas VI 8,5%. Penelitian Bank Dunia (1994) menyatakan bahwa sebagian besar anak-anak yang mengulang adalah kelas-kelas awal terutama kelas I dan

II. Di kedua kelas ini, jumlahnya meliputi sekitar 60% dari seluruh murid yang mengulang (ZA Achmady, 1995).

3. Dalam hal mutu pendidikan, secara umum telah diketahui bahwa mutu pendidikan belum memuaskan. Sebagai salah satu indikator, rata-rata NEM di SD selama lima tahun terakhir berkisar antara 4,98 sampai 7,31, dan yang paling rendah adalah NEM Matematika. Indikator lain adalah kemampuan membaca (meliputi memahami bahan bacaan) anak SD masih rendah. (Depdikbud, 1994).

Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SD merupakan kebijakan strategis, setelah keberhasilan pemerataan kesempatan belajar melalui wajar enam tahun. Mutu pendidikan yang tinggi di SD akan memberikan landasan yang kuat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Didasarkan pada kebijakan Depdikbud, mutu pendidikan merupakan kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku (Depdikbud, 1994:). Secara sederhana pengelolaan terhadap komponen dimaksud dapat memperlihatkan gambaran mutu pendidikan yang dapat dikenali melalui tanda-tanda operasional berupa:

- a. Keluaran/lulusan sekolah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Nilai akhir sebagai salah satu alat ukur terhadap prestasi belajar siswa.
- c. Persentase lulusan yang dicapai semaksimal mungkin oleh sekolah.
- d. Penampilan kemampuan dalam semua komponen pendidikan.

Upaya pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya telah dilakukan bersamaan dengan upaya pemerataan kesempatan belajar. Selama PJP I telah banyak reformasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Reformasi dimaksud meliputi sistem pendidikan secara umum (UUSPN, 8 PP, 1 Kepres, dan 1 Inpres), kurikulum (1968, 1975, 1984, 1994), ketenagaan pendidikan (penataran dan peningkatan kualifikasi, pengelolaan PBM (PPSP, SD Pamong, SD Kecil, CBSA, KKG, KKKS, sarana dan prasarana (ZA Achmady, 1995).

Upaya peningkatan mutu pendidikan di SD yang saat ini masih berlangsung adalah: Peningkatan mutu Guru di antaranya melalui penyetaraan D2, Program Makanan Tambahan untuk Anak SD (PMTAS), Pengadaan Buku Pelajaran, Peningkatan Peran serta Masyarakat, dan Proyek Peningkatan Mutu SD (*Primary Educational Quality Improvement Project*) atau lebih dikenal dengan singkatan PEQIP (Dedi Supriadi, 1997). PEQIP dilaksanakan sejak tahun 1992/1993, di enam propinsi, yaitu: DI Aceh, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Tujuan PEQIP adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu (kualitas) proses belajar-mengajar sehingga murid dapat menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya (Depdikbud, 1995:9).

Cakupan kegiatan PEQIP meliputi: (1) Peningkatan mutu PBM, yakni; (a) Pengembangan (pembinaan) profesional tenaga guru termasuk tenaga kependidikan lainnya, (b) Pembinaan promosi (karir) guru, (c) Pengadaan dan pengiriman buku-buku dan sarana pendidikan, (2) Pemberian bantuan dalam rangka peningkatan kemampuan SD-SD kurang terlayani, yakni; (a) Peningkatan kemampuan manajerial kepala sekolah, khususnya yang tertarik dengan pengelolaan keuangan sekolah, (b) Peningkatan mutu PBM, (3) Peningkatan kemampuan pengelolaan (manajemen) Pendidikan Dasar, yakni: (a) Peningkatan dukungan administrasi daerah, (b) Pengembangan perencanaan biaya sekolah, (c) Pengembangan kemampuan lembaga/institusi Direktorat Pendidikan Dasar, (4) Evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek; (a) Manajemen proyek, (b) Evaluasi dan Monitoring, serta (c) Pelaporan.

Usaha peningkatan mutu pendidikan dimulai dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan khususnya guru. Penelitian menunjukkan bahwa 34% mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor guru (di negara maju 36%). Bandingkan dengan faktor pengelolaan 22%, sarana fisik 26%, dan waktu belajar 18% (Heyneman dan Loxley, 1983). Kajian lebih mendalam lagi dalam aspek guru itu sendiri ternyata bahwa terdapat korelasi positif antara kemampuan mengajar (0.78), penguasaan metodologi pengajaran (0.90) dan penguasaan materi (0.79) dengan prestasi belajar siswa (Nana, Sudjana, dkk. 1993).

Peningkatan mutu guru SD dilakukan melalui Sistem Pembinaan Profesional (SPP), dan Gugus Sekolah. SPP ialah sistem pembinaan yang diberikan kepada guru dengan menekankan bantuan pelayanan profesi berdasarkan kebutuhan lapangan melalui wadah profesional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan (Keputusan Dirjen Dikdasmen: No.079/C/Kep/I/ 1993). Strategi pemantapan SPP ini dilaksanakan melalui Gugus Sekolah yang terdiri atas satu SD Inti, dan dua sampai tujuh SD Imbas. Pada setiap gugus sekolah dibentuk wadah Pusat Kegiatan Guru (PKG). Sementara tenaga kependidikan membentuk kelompok profesional, yaitu: Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Kelompok Kerja Penilik Sekolah (KKPS). Pembinaan kualitas profesi guru melalui SPP pada dasarnya menggunakan prinsip "penataran antara teman sejawat" dan dilakukan secara terus menerus berkelanjutan serta tertuang dalam suatu program (Dirdikdas, 1995:13).

Kajian terhadap cakupan dan kegiatan PEQIP, tergambar bahwa kegiatan bimbingan dan konseling di SD belum merupakan kegiatan tersendiri, melainkan terintegrasi dalam peningkatan mutu PBM. Salah satu sasaran peningkatan mutu PBM adalah peningkatan perhatian guru terhadap siswa secara individual. Termasuk didalamnya pemberian tugas sesuai dengan kemampuan siswa, pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan, pemberian bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, pemberian bantuan bagi siswa yang memiliki prestasi di atas rata-rata.

Tujuan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri atas dua dimensi tujuan yang berkaitan satu sama lain.

Pertama adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi setiap orang yang berumur 7-15 tahun untuk memperoleh pendidikan.

Kedua adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai minimal kelas III SLTP.

Keterkaitan antara pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan peningkatan kualitas SDM, dapat dianalisis dari beberapa alasan pentingnya wajar dikdas 9 tahun. *Pertama*, sebagian besar tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD dan bahkan kurang. Kondisi ini jauh ketinggalan dibanding dengan

negara ASEAN lainnya, apalagi dibanding dengan negara industri baru. *Kedua*, dari segi ekonomi, Dikdas 9 tahun merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, ada bukti-bukti kuat bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar peluang seseorang untuk mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan negara serta lebih memiliki kesadaran sebagai warga negara beserta hak dan kewajibannya. *Keempat*, dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, sehingga pada gilirannya akan memperbesar peluang mereka untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan makna hidupnya.

Dengan adanya Wajar Dikdas 9 Tahun, maka semua lulusan SD didorong untuk melanjutkan ke SLTP (Depdikbud, 1994:11). Keadaan ini menyebabkan terjadinya perubahan amat mendasar tentang fungsi SD, yaitu dari fungsi terminal menjadi fungsi transisional untuk melanjutkan ke jenjang SLTP atau sederajat. Oleh karena itu pendidikan di sekolah dasar perlu melakukan reorientasi dalam aspek: tujuan, pandangan terhadap perkembangan anak, proses belajar mengajar, dan evaluasi.

Dalam aspek tujuan, pendidikan di SD tidak lagi menyiapkan murid terjun ke masyarakat melainkan menyiapkan murid untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP. Perubahan orientasi tujuan ini sejalan dengan perubahan terhadap orientasi terhadap perkembangan anak. Karena lulusan SD harus siap melanjutkan ke SLTP, maka pendidikan di SD tidak semata-mata mengembangkan kemampuan baca, tulis dan hitung, akan tetapi harus memungkinkan murid memiliki kesiapan intelektual, pribadi, maupun sosial. Kesiapan intelektual diperlukan karena tugas-tugas pembelajaran (*learning task*) di SLTP sebagai kelanjutan dari tugas pembelajaran di SD yang menghendaki murid tidak hanya tahu dan hapal informasi melainkan diperlukan kemampuan belajar yang berorientasi pemahaman dan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Kesiapan pribadi diperlukan untuk memasuki pendidikan dasar 9 tahun agar murid memiliki ketahanan pribadi dan kemampuan penyesuaian yang adekuat terhadap tuntutan dan lingkungan belajar baru. Sedangkan

kesiapan sosial dipandang sebagai salah satu faktor pendukung yang harus dikembangkan kepada murid-murid SD agar mereka memiliki kemampuan untuk memahami aturan dan nilai-nilai yang beragam di dalam kelompok serta mampu berinteraksi dengan kelompok yang beragam itu secara harmonis dan etis (Sunaryo Kartadinata, dkk., 1994).

Fenomena tersebut sebenarnya gayut dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang diharapkan GBHN dan UUSPN. Intisari tujuan pendidikan nasional mengandung tiga dimensi tujuan, yaitu: (a) perkembangan pribadi peserta didik, (b) pembinaan peserta didik agar menjadi warga masyarakat dan negara yang baik, (c) penyiapan peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kemampuan dan keterampilan yang fungsional bagi kehidupan pribadinya, masyarakatnya, dan bangsanya. Dalam konteks ini, maka kebijakan *link and match* yang digariskan Mendikbud hendaknya difahami bahwa proses pendidikan terkait erat dengan ke tiga dimensi tujuan pendidikan tersebut. Proses pendidikan harus membantu peserta didik mampu memahami potensi diri, peluang dan tuntutan lingkungan, dan merencanakan masa depan melalui pengambilan serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya. Kemampuan seperti ini tidak selalu menyangkut aspek akademis melainkan lebih banyak menyangkut perkembangan pribadi, sosial, kematangan berpikir dan sistem nilai.

Pengembangan kemampuan di atas mesti serempak terjadi dengan pengembangan kemampuan akademik maupun keterampilan profesional. Hal ini berarti bahwa dalam proses pendidikan perlu ada strategi upaya yang sistemik dan sistematis untuk membantu peserta didik mampu memahami dirinya, memahami lingkungan dan merencanakan masa depan melalui pengambilan keputusan yang efektif. Kemampuan ini bukanlah suatu proses yang terjadi seketika melainkan terbentuk melalui proses interaksi dan terkait dengan berbagai faktor kemampuan diri, keluarga, masyarakat, maupun sistem nilai yang dianut. Strategi upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan tersebut disebut dengan layanan bimbingan dan konseling.

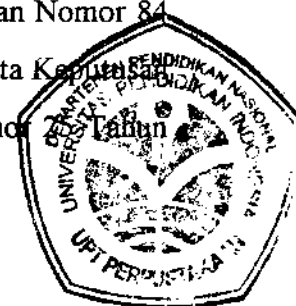
Dalam kondisi seperti ini, upaya bimbingan dan konseling di SD memiliki peranan yang besar. Hal ini berangkat dari tesis bahwa layanan bimbingan merupakan usaha pengembangan SDM. Tyler (dalam Blocher, 1987: 11) menyatakan bahwa: "*the*

psychological purpose of Counseling is to facilitate development". Demikian pula Dinkmeyer and Caldwell (1970: 10) menyatakan bahwa: Semua manusia bernilai dan memiliki hak untuk berkembang secara optimum, oleh karena itu bimbingan dan konseling perkembangan hendaknya memberikan layanan untuk rekonsiliasi kekhasan individual dengan tuntutan masyarakat dan kebudayaannya. Tampak di sini ada pergeseran konsep dalam bimbingan dan konseling dari konsep terapeutik-klinis kepada *preventif-developmental* dan bahkan lintas budaya (*out-reach counseling*). Layanan bimbingan tidak lagi hanya berurusan dengan perilaku salah suai atau perilaku bermasalah, dan juga tidak sekedar mencegah munculnya perilaku bermasalah melainkan mengembangkan potensi peserta didik.

Berbeda dengan di SLTP dan sekolah menengah, dalam adegan pendidikan di SD guru memiliki tugas ganda, di samping bertugas sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran, ia juga bertugas sebagai guru pembimbing (Kep.Mendikbud Nomor 025/0/ 1995). Oleh karena itu guru hendaknya menata iklim belajar-mengajar yang bermuatan bimbingan dan memungkinkan terciptanya kesempatan bagi siswa untuk pemahaman dan keterampilan pribadi dan sosial bersamaan dengan mempelajari bahan ajar yang harus dikuasainya secara intelektual. Prinsip *developmentally appropriate practice* (Bredenkamp, 1992, dan David Elkind, 1991) merupakan prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam mengemas bahan ajar di SD. Prinsip ini menghendaki terjadinya kesepadanan antara bahan ajar dengan perkembangan peserta didik.

B. Masalah Penelitian

Menelusuri kembali perjalanan pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar, landasan formalnya telah tercantum dalam Kurikulum SD Tahun 1975. Kurikulum SD Tahun 1975 Buku III C khusus memuat pedoman pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dasar. Landasan formal lainnya adalah Pedoman Pelaksanaan Bimbingan di SD Tahun 1987, UU Nomor 2 Tahun 1989, dan PP Nomor 28 Tahun 1990, SK Menpan Nomor 26 Tahun 1989 yang diperbaharui dalam SK Menpan Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor 23 Tahun



1993 (dan 1995) tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar Tahun 1994.

Tugas pokok guru di sekolah dasar dalam melaksanakan bimbingan adalah: menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya (SK Menpan Nomor 84/1993 Pasal 3 Ayat 2).

Sekalipun azas formal pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD telah kokoh, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hasil pemantauan di lapangan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan bimbingan di SD belum merupakan layanan khusus, tetapi dilakukan langsung oleh guru kelas terpadu dalam PBM. Padahal guru kelas belum dibekali secara khusus tentang pelaksanaan bimbingan. Tidak mengherankan jika penelitian Sunaryo Kartadinata (1996) menyimpulkan bahwa layanan bimbingan telah tampak sudah diupayakan guru sebagai bagian terpadu dari PBM namun masih belum merupakan kegiatan yang sistemik dan terencana dengan baik. Penelitian Adjat R, dkk. (1992: 18) menyimpulkan bahwa aktivitas bimbingan pada umumnya di SD belum terlaksana. Demikian pula temuan penelitian Anwar Sutoyo (1993) memberikan gambaran bahwa guru SD masih menyamakan pengertian bimbingan, dengan nasehat atau pengarahan, dan mengalami kesulitan dalam memahami konsep tentang bimbingan.

Hasil monitoring PEQIP di Propinsi Sumatera Barat (Dirdikdas, 1996a:5) memberikan gambaran bahwa perhatian guru terhadap siswa umumnya telah ada, walaupun masih bersifat klasikal. Pengelompokan atau penugasan yang didasarkan atas kemampuan belum ada, demikian juga pemantauan dan bimbingan terhadap kelompok atau individu lambat belajar belum ada. Gambaran yang sama juga ditemukan di DI Aceh (Dirdikdas, 1996b:12). Perhatian guru kepada individu-individu, antara lain ditunjukkan dengan mengingat nama, mendatangi kelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas, mencoba menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan siswa. Guru SD belum memberikan pengayaan kepada siswa-siswa yang pandai setelah

menyelesaikan tugas-tugas dan memberikan PR yang berbeda untuk siswa-siswa yang lemah.

Mencermati fenomena tersebut di atas, tampak adanya kesenjangan antara konsep bimbingan dan konseling yang seharusnya dilaksanakan di SD dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini berupaya untuk menata pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar sehingga bermakna bagi perkembangan peserta didik. Masalah penelitian ini adalah bagaimana menemukan model bimbingan dan konseling yang fisibel di sekolah dasar.

C. Fokus Masalah dan Identifikasi Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Masalah Penelitian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (Pasal 1). Penjabaran lebih lanjut pengertian bimbingan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Bab X Pasal 25, yaitu: Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar peserta didik mampu mandiri dan berkembang secara optimal.

Sekiranya perkembangan yang optimal menjadi tujuan bimbingan dan konseling, maka layanan bimbingan dan konseling di SD hendaknya memberikan layanan untuk penyesuaian kekhasan individual dengan tuntutan masyarakat dan kebudayaannya. Hal ini bertolak dari asumsi bahwa perkembangan optimal terjadi melalui interaksi yang sehat antara individu yang sedang berkembang dengan lingkungannya. Oleh karena itu fokus penelitian ini diarahkan untuk menemukan model bimbingan yang kondusif bagi perkembangan anak di sekolah dasar.

Dalam perspektif ekologis tujuan dari konselor perkembangan adalah mempermudah interaksi antara klien dengan lingkungannya yang akan menumbuhkan klien secara optimal supaya terarah pada tujuan bagi dirinya. Dalam konteks sosial yang lebih luas konselor perkembangan juga penting untuk peduli dengan pemeliharaan

lingkungan belajar yang positif dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang akan mendorong dan memperkaya pertumbuhan dan perkembangan seluruh anggota. Kebanyakan lingkungan belajar kurang mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia secara penuh. Kritik terhadap pendidikan modern bahwa kebanyakan sekolah tidak kondusif secara psikologis dan kesehatan. Menurut George M. Gazda (1991:25) konselor di masa depan harus menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif.

Esensi lingkungan belajar adalah lingkungan dalam konteks fisik, sosial dan psikologis dalam hal mana siswa memperoleh perilaku-perilaku baru yang lebih efektif. Dengan kata lain dalam proses bimbingan terjadi proses belajar yang dialami para siswa untuk memperoleh perilaku yang efektif. Lingkungan belajar ini menstrukturkan dan membentuk kesempatan, harapan dan persepsi yang mungkin berkaitan atau tidak berkaitan dengan kebutuhan dan motif dasar mereka.

Pemikiran tentang pendekatan ekologis ini mengundang guru pembimbing-- dalam hal ini guru kelas-- untuk merancang dan melaksanakan bimbingan yang kondusif bagi siswa melakukan pengamatan lebih dekat terhadap masalah yang dipelajari, dan mengembangkan kerangka kerja untuk memahami perubahan perilaku. Seorang guru memang dikehendaki memahami secara cermat akan hakekat perkembangan manusia dan hakekat interaksi. Dengan kata lain seorang guru dituntut peduli terhadap "ekologi perkembangan manusia".

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka fokus permasalahan penelitian adalah bagaimanakah menemukan model bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang didasarkan atas keunikan murid SD dan potensi lingkungannya ?

2. Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Masalah penelitian yang lebih rinci dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa karakteristik, kebutuhan, masalah perkembangan murid SD dan implikasi programatik bagi layanan bimbingan dan konseling di sekolah ?
- b. Apa potensi, kesempatan, kemampuan, tuntutan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ?

- c. Layanan bimbingan yang bagaimanakah yang telah dilaksanakan di sekolah dasar ?
- d. Unsur-unsur apakah yang harus dikembangkan dalam model bimbingan konseling perkembangan di SD ?
- e. Bagaimanakah hasil implementasi model bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah dasar ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model bimbingan dan konseling perkembangan di Sekolah Dasar, dan manual pelaksanaannya. Penemuan model bimbingan dan konseling perkembangan bertolak dari karakteristik siswa, potensi lingkungan, kondisi aktual layanan-layanan yang bermuatan bimbingan dalam proses pendidikan di SD, dan model bimbingan dan konseling perkembangan ideal berdasarkan konsep-konsep bimbingan. Tujuan penelitian yang lebih rinci adalah memperoleh data berkenaan dengan:

1. Karakteristik, kebutuhan, masalah perkembangan murid SD dan implikasi programatik bagi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar.
2. Potensi, kesempatan, kemampuan, tuntutan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar.
3. Layanan bimbingan yang telah dilaksanakan di sekolah dasar
4. Unsur-unsur model bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah dasar.
5. Hasil implementasi model bimbingan dan konseling perkembangan di SD.

Sebagai pelengkap model bimbingan dan konseling perkembangan di SD disusun Manual Pelaksanaan Bimbingan dan konseling Perkembangan di SD yang mencakup:

- a. Manual Layanan Dasar Bimbingan
- b. Manual Layanan Responsif
- c. Perencanaan Individual.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan wawasan dalam khasanah bimbingan dan konseling di Indonesia, khususnya berkenaan bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah dasar. Temuan penelitian ini bermanfaat untuk penyelenggaraan pendidikan konselor di Jurusan PPB, dan penyiapan guru SD melalui PGSD.
- b. Memberikan wawasan bagaimana mengembangkan intervensi bimbingan dan konseling yang bertolak dari karakteristik siswa, potensi lingkungan, dan kondisi aktual layanan bimbingan dan konseling di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menyumbangkan buku model bimbingan dan konseling perkembangan di SD. Dengan membaca buku ini guru SD diharapkan memperoleh wawasan tentang bimbingan dan konseling perkembangan.
- b. Penelitian ini menghasilkan manual pelaksanaan bimbingan dan konseling perkembangan. Dengan membaca manual ini guru SD diharapkan memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan di sekolahnya masing-masing.
- c. Penelitian ini menghasilkan buku Agenda Harianku sebagai penjabaran dari Layanan Perencanaan Individual. Guru-guru dan orang tua merasakan manfaat langsung dalam mendorong kegiatan belajar murid.
- d. Melalui penelitian ini, para guru SD dibekali informasi tentang bimbingan dan konseling perkembangan, sekaligus dilatih bagaimana mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah dasar. Hal ini dimungkinkan mengingat intervensi terhadap para guru SD dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan uji coba.